

Penarikan 2027

Formulir III - PDN

**FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2027
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2028 S.D. 2031**

Kementerian/Lembaga : _____

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAGIAN B**ESTIMASI SISA KOMITMEN PINJAMAN DALAM NEGERI****1. Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri s.d. Akhir 2025**

No.	Nama Pemberi Pinjaman	Unit Eselon I	Kode Pinjaman	Nomor Register	Nama Proyek	Sisa Komitmen PDN s.d. Akhir 2025				
						Total	Penarikan Kumulatif s.d. 2025	Dana Kontinjensi dan Tidak Dapat Dimanfaatkan	Rencana Cancellation	Belum Ditarik s.d. Akhir 2025
(A1)	(A2)	(A3)	(A4)	(A5)	(A6)	(B1)	(B2)	(B3)	(B4)	(B5)
										(B5) = (B1) – (B2) – (B3) – (B4)
						dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount
					ONGOING					
1.										
2.										
3.										
					PIPELINE					
1.										
2.										
3.										
					TOTAL (Z1)					

2. Proyeksi Jangka Menengah Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

No.	Nama Pemberi Pinjaman	Nama Unit Eselon I	Kode Pinjaman	Nomor Register	Nama Proyek	Proyeksi Jangka Menengah Pinjaman Dalam Negeri					Sisa
						2028	2029	2030	2031	2032 dst.	
(A1)	(A2)	(A3)	(A4)	(A5)	(A6)	(C14)	(C15)	(C16)	(C17)	(C18)	(C19)
											(C19) = (B13) - (C13) - (C14) - (C15) - (C16) - (C17) - (C18)
						dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount	dalam rupiah full amount
					ONGOING						
1.											
2.											
3.											
					PIPELINE						
1.											
2.											
3.											
					TOTAL ONGOING (Z2)						
					TOTAL PIPELINE (Z3)						
					TOTAL (Z4)						

Disetujui oleh

..... (Z5)

Stempel (Z6)

..... (Z7)

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2027
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2028 S.D. 2031**

PENJELASAN UMUM

1. Formulir ini terdiri atas tiga bagian sebagai berikut.
Bagian A : Ringkasan Informasi Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri
Bagian B : Estimasi Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri
 1. Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri s.d. Akhir 2025
 2. Perkiraan Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri s.d. Akhir 2026Bagian C : Usulan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2027 dan Proyeksi Jangka Menengah
 1. Rencana Penarikan Pinjaman Dalam Negeri Bulanan
 2. Proyeksi Jangka Menengah Penarikan Pinjaman Dalam NegeriSemua bagian formulir tersebut harus diisi dengan lengkap.
2. Kementerian/Lembaga mengumpulkan bahan paparan penjelasan perkembangan penyiapan dan pelaksanaan proyek serta rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2027 dan informasi pendukung lainnya.
3. Pinjaman kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan statusnya, yaitu *ongoing* dan *pipeline*.
 - a. Pinjaman dikelompokkan sebagai berstatus *ongoing* apabila perjanjian pinjaman kegiatan tersebut telah ditandatangani antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Republik Indonesia serta telah diterbitkan nomor registernya oleh Kementerian Keuangan.
 - b. Pinjaman dikelompokkan sebagai berstatus *pipeline* apabila kegiatan masih dalam tahap perencanaan atau perjanjian pinjaman kegiatan tersebut belum ditandatangani sampai dengan tanggal penyampaian usulan.
4. Versi *softcopy* dari formulir ini baik dalam format pdf dan xlsx serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan *trilateral meeting* penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah dapat diakses pada situs DJPPR pada tautan:

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/layanantilateralmeeting>

BAGIAN A
RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN PINJAMAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN A
(A1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(A2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , namun sudah ada indikasi pemberi pinjamannya, dicantumkan nama pemberi pinjaman dimaksud.
(A3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman.
(A4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi.
(A5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi.
(A6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
(A7)	Diisi dengan nama program yang sesuai dengan rancangan RKA-KL.
(A8)	Diisi dengan nama rincian output yang sesuai dengan rancangan RKA-KL.
(A9)	Diisi dengan nama <i>tagging</i> Prioritas Nasional apabila kegiatan pinjaman menjadi Rincian Output Prioritas Nasional dalam rancangan RKA-KL.
(A10)	Diisi dengan provinsi lokasi pelaksanaan pinjaman kegiatan. Dalam hal pinjaman kegiatan merupakan <i>single contract</i> berupa pembelian barang yang tidak terikat dengan lokasi, kolom lokasi dapat diisi dengan kata "Nasional".
(A11)	Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , kolom ini diisi dengan nomor dan tahun dokumen DKPDN berkenaan. Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini diisi dengan nomor dan tahun dokumen DKPDN yang mencantumkan pinjaman kegiatan ini.
(A12)	Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , kolom ini diisi dengan tahun periode DKPPDN berkenaan. Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini diisi dengan nomor dan tahun DKPPDN yang mencantumkan kegiatan tersebut.
(A13)	Dapat diisi dengan penjelasan singkat proses penyiapan dan pengusulan pinjaman dalam negeri.
(A14)	Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan tanggal penandatanganan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , diisi dengan perkiraan tanggal penandatanganan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri yang memperhatikan proses penerbitan dokumen perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas hingga jadwal seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri dan negosiasi pinjaman oleh Kementerian Keuangan.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN A
(A15)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal batas akhir penarikan pinjaman dalam negeri sebagaimana penandatanganan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri atau amendemennya yang telah mendapat penetapan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal berakhirnya penarikan pinjaman yang memperhatikan umur proyek.</p>

BAGIAN B
ESTIMASI SISA KOMITMEN PINJAMAN DALAM NEGERI

1. Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri s.d. Akhir 2025

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.1.
(A1)	<p>Diisi dengan nomor baris isian data.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A1) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A2)	<p>Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>).</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, namun sudah ada indikasi pemberi pinjamannya, dicantumkan nama pemberi pinjaman dimaksud.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A2) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A3)	<p>Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A3) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A4)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A4) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A5)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A5) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A6)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek diisi dengan mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A6) pada Bagian A formulir ini.</p>
(B1)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, nilai total komitmen atau nilai pinjaman dalam negeri diisi dengan nilai sebagaimana tercantum pada sebagaimana naskah perjanjian pinjaman dalam negeri beserta amendemennya yang telah mendapat penetapan.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nilai total komitmen diisi dengan indikasi nilai komitmen pinjaman sebagaimana tercantum pada DKPDN dan/atau DKPPDN yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Nilai total komitmen disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(B2)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nilai penarikan kumulatif pinjaman dalam negeri hingga 31 Desember 2025 termasuk penarikan yang dalam proses pengesahan hingga akhir Maret 2026 sebagai Realisasi TA 2025.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol).</p> <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(B3)	<p>Diisi dengan porsi dana kontinjensi dalam nilai total komitmen pinjaman yang tidak akan dimanfaatkan.</p> <p>Pengisian kolom ini mengikuti ketentuan dalam naskah perjanjian pinjaman.</p> <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.1.
(B4)	<p>Dalam hal akan diajukan <i>partial cancellation</i> pada 2025, diisi dengan perkiraan atau usulan nilai komitmen pinjaman yang akan diajukan <i>partial cancellation</i>-nya.</p> <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(B5)	<p>Diisi dengan nilai komitmen pinjaman luar negeri yang belum ditarik hingga akhir tahun 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> <p>$(B5) = (B1) - (B2) - (B3) - (B4)$</p> <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(Z1)	<p>Diisi dengan total untuk setiap kolom dalam rupiah.</p>

2. Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri s.d. Akhir 2026

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.2.
(A1)	<p>Diisi dengan nomor baris isian data.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A1) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A2)	<p>Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>).</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, namun sudah ada indikasi pemberi pinjamannya, dicantumkan nama pemberi pinjaman dimaksud.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A2) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A3)	<p>Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A3) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A4)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A4) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A5)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A5) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A6)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek diisi dengan mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A6) pada Bagian A formulir ini.</p>
(B6)	<p>Diisi dengan alokasi penarikan pinjaman dalam negeri yang sebagaimana Surat Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran 2026 atau DIPA 2026 sebelum dilakukan revisi anggaran pagu berubah.</p> <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B.2.
(B7)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran dalam hal lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman TA 2025 pada Revisi Anggaran TA 2026, diisi dengan nilai lanjutan penarikan atas sisa pagu DIPA 2024 yang belum terserap.</p> <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat bagi K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2026.</p>
(B8)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran dalam rangka percepatan penarikan, diisi dengan estimasi nilai percepatan penarikan yang akan dilakukan pada TA 2026.</p> <p>Estimasi nilai percepatan yang dicantumkan adalah estimasi yang realistis sesuai dengan perkembangan kemajuan kegiatan dan menggambarkan kebutuhan proyek secara riil.</p> <p>Nilai estimasi disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2026.</p>
(B9)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran akibat selisih kurs, diisi dengan estimasi nilai penambahan pagu karena selisih kurs yang akan dilakukan pada TA 2026.</p> <p>Nilai estimasi disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2026.</p>
(B10)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran dalam rangka pengurangan pagu, diisi dengan estimasi nilai pengurangan pagu yang akan dilakukan pada TA 2026.</p> <p>Estimasi nilai pengurangan pagu yang dicantumkan memperhatikan ketentuan pengurangan pagu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.</p> <p>Nilai estimasi disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2026.</p>
(B11)	<p>Dalam hal terdapat pagu yang diproyeksikan tidak dapat terserap pada TA 2026, namun berdasarkan ketentuan mengenai revisi anggaran bahwa pagu tersebut tidak dapat dikurangi, maka estimasi pagu yang tidak terserap dan tidak dapat diajukan revisi anggarannya disajikan dalam kolom ini.</p> <p>Nilai estimasi disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(B12)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> $(B12) = (B6) + (B7) + (B8) + (B9) - (B10) - (B11)$ <p>Nilai estimasi disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(B13)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> $(B13) = (B5) - (B12)$ <p>Nilai estimasi disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(Z1)	<p>Diisi dengan total untuk setiap kolom dalam rupiah.</p>

BAGIAN C**USULAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH**

1. Rencana Penarikan Pinjaman Dalam Negeri Bulanan

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.1.
(A1)	<p>Diisi dengan nomor baris isian data.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A1) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A2)	<p>Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>).</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, namun sudah ada indikasi pemberi pinjamannya, dicantumkan nama pemberi pinjaman dimaksud.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A2) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A3)	<p>Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A3) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A4)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A4) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A5)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A5) pada Bagian A formulir ini.</p>
(A6)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek diisi dengan mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A6) pada Bagian A formulir ini.</p>
(C1)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Januari 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(C2)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Februari 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(C3)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Maret 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(C4)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan April 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(C5)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Mei 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(C6)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Juni 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(C7)	<p>Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Juli 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.1.
(C8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Agustus 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan September 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Oktober 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan November 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Bulan Desember 2027 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C13)	Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut. $(C13) = (C1) + (C2) + (C3) + (C4) + (C5) + (C6) + (C7) + (C8) + (C9) + (C10) + (C11) + (C12)$ Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(Z2)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dalam rupiah untuk setiap kolom.
(Z3)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> dalam rupiah untuk setiap kolom.
(Z4)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> dalam rupiah untuk setiap kolom.

2. Proyeksi Jangka Menengah Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.2.
(A1)	Diisi dengan nomor baris isian data. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A1) pada Bagian A formulir ini.
(A2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , namun sudah ada indikasi pemberi pinjamannya, dicantumkan nama pemberi pinjaman dimaksud. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A2) pada Bagian A formulir ini.
(A3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A3) pada Bagian A formulir ini.
(A4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A4) pada Bagian A formulir ini.
(A5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A5) pada Bagian A formulir ini.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C.2.
(A6)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek diisi dengan mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Isian pada kolom ini konsisten dengan isian kolom (A6) pada Bagian A formulir ini.</p>
(C14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2028 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2029 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2030 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2031 dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2032 sampai dengan tahun terakhir penarikan pinjaman dalam rupiah secara <i>full amount</i> .
(C19)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> $(C19) = (B13) - (C13) - (C14) - (C15) - (C16) - (C17) - (C18)$ <p>Nilai disajikan dalam rupiah secara <i>full amount</i>.</p>
(Z2)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dalam rupiah untuk setiap kolom.
(Z3)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> dalam rupiah untuk setiap kolom.
(Z4)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> dalam rupiah untuk setiap kolom.
(Z5)	<p>Diisi dengan nama jabatan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pekerjaan Umum 2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
(Z6)	Dibubuhkan tanda tangan dan stempel jabatan. Dapat digunakan tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>).
(Z7)	Diisi dengan nama lengkap Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang.